



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengembangkan potensi sektor Kepemudaan dan Keolahragaan agar lebih berkualitas, Dinas Pemuda dan Olah Raga selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Selalu diawali dengan perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Kerja Tahun Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sebagaimana telah di ubah dengan Peruran Daerah Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan maksud menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga selama Tahun Anggaran 2022



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Laporan Keuangan OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Untuk menyampaikan informasi keuangan OPD secara transparan, jujur dan akuntabel mengenai kinerja keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau pada Per 31 Desember Tahun 2022 untuk diketahui dan disampaikan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Daerah Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 03 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 257);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. (Berita Daerah Nomor 803);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 858).
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 861);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk mempermudah proses memahami dan menilai serta mengevaluasi Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai berikut:

1. BAB I Berupa pendahuluan menjelaskan tentang :
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
2. BAB II Berisi tentang pencapaian target kinerja APBD.
 - 2.1 Ekonomi Makro/ Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.4 Penjelasan Perubahan Anggaran
3. BAB III Berisi tentang Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan terdiri dari :
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

4. BAB IV Berisi tentang kebijakan akuntansi mengenai basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
 - 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
 - 4.2 Basis Akutansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
 - 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; SKPD;
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.
5. BAB V Berisi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan SOPD tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.
6. BAB VI Berisi tentang informasi-informasi nonkeuangan SOPD
7. BAB VII Merupakan penutup Catatan Atas Laporan Keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Permasalahan yang muncul seperti pengangguran, kemiskinan, tingkat harga mempunyai, Implansi akibat yang buruk terhadap jalannya perekonomian dan mengganggu kestabilan ekonomi suatu Daerah. Atas dasar itu, bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu Daerah tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, perlu dipahami terlebih dahulu tujuan dari kegiatan perekonomian suatu Daerah secara makro.

Ada pun tujuan ekonomi makro ada beberapa macam dan berpengaruh terhadap perekonomian suatu Daerah. Setiap tujuan tersebut ditujukan untuk memecahkan persoalan yang muncul.

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh stakeholders, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan kata lain, arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau hingga tahun 2022 secara umum terjadi pemulihan dari tahun 2021 akibat pandemi COVID-19, hal ini ditandai dengan naik/turunnya beberapa indikator makro ekonomi. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan 2010, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamandau pada tahun 2019 adalah 6,87 persen, pada tahun 2020 sebesar 1,85 persen dan pada tahun 2021 sebesar 4,01 persen. Angka PDRB Kabupaten Lamandau mengalami kenaikan, dari 3,75 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 3,82 triliun rupiah pada tahun 2020, pada tahun 2021 3,96 triliun. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Lamandau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,01 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 1,85 persen. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini



menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 dapat diatasi.

Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat telah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga aktifitas masyarakat sudah kembali normal diharapkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 terjadi percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Lamandau. Beberapa strategi yang diambil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Lamandau, sebagai berikut:

1. Mendorong pemulihan perekonomian rakyat dan kesempatan kerja.
2. Meningkatkan kompetensi dan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan usaha pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan UMKM.
4. Menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Sumber : Perubahan Kebijakan Umum Apbd Tahun 2022

2.2. Kebijakan Keuangan

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah memiliki otonomi seluas-luasnya untuk mengatur kebutuhan wilayahnya sendiri. Setiap daerah diberikan wewenang untuk mengurus pendapatan dan pengeluaran daerah dalam bentuk APBD. Hal ini dimaksudkan agar terjadi percepatan pertumbuhan daerah dan efisiensi dari setiap kebijakan yang dibuat. Kebijakan keuangan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu kebijakan umum pendapatan daerah, kebijakan umum belanja daerah, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sumber : Perubahan Kebijakan Umum Apbd Tahun 2022

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2022 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah yaitu Retribusi Tempat Rekreasi dan



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Olahraga dianggarkan sebesar Rp 23.400.000,00 realisasinya sebesar Rp 27.800.000,00 atau 118,80 persen

b. Realisasi Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 7.773.521.575,00 realisasinya sebesar Rp 7.677.694.430,00 atau 98,77% , dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 7.466.839.575,00 realisasinya sebesar Rp 7.371.423.220 atau 98,72 persen
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 306.682.000,00 realisasinya sebesar Rp 306.271.210,00 atau 99,87 persen.

2.4 Penjelasan Perubahan Anggaran

2.4.1 Dasar Perubahan Anggaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya Perubahan APBD kedalam rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBD

yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya perubahan APBD antara lain:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Upaya dalam pencapaian target RPJMD 2018-2023;
5. Penyesuaian standar satuan harga, perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, Proyeksi Belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada perubahan APBD tahun 2022.



2.4.2 Tujuan Perubahan Anggaran

1. Menyusaiakan perubahan prediksi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah;
2. Menyesuaikan Pendapatan Asli Daerah pada potensi yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
3. Menetapkan kegiatan dan anggaran yang ditambah/baru maupun dikurangi ataupun dihilangkan untuk dapat diakomodir dalam RAPBD Perubahan 2022
4. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2022;
5. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan daerah walaupun adanya perubahan anggaran;
6. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
7. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
8. Pencapaian target kinerja tujuan dan kinerja sasaran daerah

2.4.3 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Anggaran

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang semula oleh setiap PD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut ::

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan;
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan otonomi daerah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

3. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam, non alam maupun sosial;
4. Kegiatan fisik dan non fisik yang dapat diselesaikan pada sisa tahun anggaran guna percepatan pembang.

2.4.4 Perubahan Anggaran Perangkat Daerah

Untuk Perubahan Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran tahun 2022,

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Targetkan Sebesar Rp 23.400.000,00 Mengalami Perubahan Sebesar Rp 8.540.000,00 atau Naik 57,47% dari target APBD Murni Sebesar Rp.14.860.000,00 yang berasal dari Retribusi Daerah (Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) yang di Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga.
- b. Belanja Mengalami Perubahan dari Rp 5.183.069.190,00 menjadi Rp 7.773.521.575,00 Meningkat Sebesar Rp 2.590.452.385,00 atau naik 49,98% dari belanja pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Mengalami Perubahan sebesar Rp 2.288.770.385,00 atau naik 44,20% yang Semula Rp 5.178.069.190,00 menjadi Rp. 7.466.839.575,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai Mengalami Perubahan sebesar Rp.635.233.079,- atau naik 28,85 % yang semula Rp 2.201.510.294,00 menjadi Rp 2.836.743.373,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Mengalami Perubahan sebesar Rp 893.037.306,00 atau naik 34,37% yang semula Rp 2.598.316.896,00 menjadi Rp 3.491.354.202,00
- c. Belanja Hibah Mengalami Perubahan sebesar Rp 760.500.000,00 atau naik 201,06% yang semula Rp 378.242.000,00 menjadi Rp 1.138.742.000,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal Mengalami Perubahan sebesar Rp 301.682.000,00 atau Naik 6033,64% yang semula Rp 5.000.000,00 Menjadi Rp 306.682.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

- a. Belanja Modal Tanah Mengalami Perubahan sebesar Rp 0,00,- atau Turun 100% yang semula Rp 5.000.000,00 menjadi Rp 0,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Mengalami Perubahan sebesar Rp 26.532.000,00 atau naik 100% yang semula Rp 0,00 menjadi Rp 26.532.000,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Mengalami Perubahan sebesar Rp 274.500.000,00 atau naik 100% yang semula Rp 0,00 menjadi Rp 274.500.000,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Mengalami Perubahan sebesar Rp 5.650.000,00 atau naik 100% yang semula Rp 0,00 menjadi Rp 5.650.000,00



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah TA 2022 diarahkan untuk meningkatkan derajat kemandirian fiskal Kabupaten Lamandau, dalam rangka pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat baik untuk membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal.

1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Target : Rp 23.400.000,00

Realisasi : Rp 27.800.000,00

Prosentase : 118,80 persen

Target dan realisasi pendapatan Daerah TA 2022 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Target : Rp 23.400.000,00

Realisasi : Rp 27.800.000,00

Presentase : 118,80 persen

Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari satu komponen yaitu:

1) Retribusi Daerah

Target : Rp 23.400.000,00

Realisasi : Rp 27.800.000,00

Presentase : 118,80 persen

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2022 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Kabupaten Lamandau, dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal.

1. Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

Target : Rp 7.773.521.575,00

Realisasi : Rp 7.677.694.430,00

Presentase : 98,77 persen

Belanja terdiri atas Belanja Operasi dan Belanja Modal:

a. Belanja Operasi

Target : Rp 7.466.839.575,00

Realisasi : Rp 7.371.423.220,00

Presentase : 98,72 persen

Terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Target : Rp 2.836.743.373,00

Realisasi : Rp 2.765.951.672,00

Presentase : 97,50 persen

2) Belanja Barang dan Jasa

Target : Rp 3.491.354.202,00

Realisasi : Rp 3.466.729.548,00

Presentase : 99,29 persen



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

3) Belanja Hibah

Target	: Rp 1.138.742.000,00
Realisasi	: Rp 1.138.742.000,00
Presentase	: 100,00 persen

b. Belanja Modal

Target	: Rp 306.682.000,00
Realisasi	: Rp 306.271.210,00
Presentase	: 99,87 persen

Terdiri dari:

1) Belanja Modal Tanah

Target	: Rp 0
Realisasi	: Rp 0
Presentase	: 0 persen

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Target	: Rp 26.532.000,00
Realisasi	: Rp 26.430.000,00
Presentase	: 99,62persen

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Target	: Rp 274.500.000,00
Realisasi	: Rp 274.191.210,00
Presentase	: 99,89 persen

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Target	: Rp 5.650.000,00
Realisasi	: Rp 5.650.000,00
Presentase	: 100 persen

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

3.2.1 Permasalahan yang dihadapi

- Ada 2 aplikasi yang di gudakan dari proses perencanaan dan pelaporan keuangan yaitu aplikasi SIPD untuk Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dan Aplikasi Simda Untuk Pelaporan Keuangan;
- Ada perbedaan antara kode akun BMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dengan kode Bagan Akun Standar (BAS).



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan OPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh OPD. Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan OPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Lamandau yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Lamandau.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat;
- d. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun berdasarkan basis akrual (accrual). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:



- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkansetiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibanyang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikeloladan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah. Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawabBendahara Umum Daerah terdiri dari :



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

1. Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
2. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
3. Kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - 1) Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - (a) Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
 - (b) Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
 - 2) Kas dicatat sebagai berikut.
 - (a) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
 - (b) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
 - (c) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Persediaan

Persediaan meliputi:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materi, perangkat dan benda pos, peralatan kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;



- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

c. Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

1) Biaya Perolehan

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan



sebagai konstruksidalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telahsiap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebutberdasarkanperbandingan nilai wajar masing-masing aset yangbersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehandiukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilaitercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atausetara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yangserupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugianyang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesarnilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatatsebesar nilaiwajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagaipendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yangmemperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaatekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi,atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat asetyang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakanmengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebutdikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yangmemungkinkanpenilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian padamasing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan,rekonstruksi dibebankan dalam laporan



operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masayang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern.

Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindahtangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
- c. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2020 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2020. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2020, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan



tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya.

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

3) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi Software komputer, Lisensi dan Frenchise, Hak Paten dan Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya, ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

4) Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain.



d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, keterikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Ada 2 (dua) Jenis Kewajiban :

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya seperti Jasa air, Listrik, internet dan Telp.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Pemerintah Daerah lainnya, Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank, Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank, Utang Dalam Negeri – Obligasi, Utang jangka panjang lainnya.

kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa dengan janji di bayar, misal utang atas belanja ATK. Kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban Membayar kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government related events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan jumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government acknowledge events), kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan. Adapun Pengukuran Kewajiban adalah :

- 1) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

- 2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah.
 - 5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
 - 6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
 - 8) Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah diukur berdasarkan karakteristiknya, sebagai berikut.
 - (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
 - (b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.
-



e. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisihantara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas diNeraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

a. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksudkan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai,maka asas bruto dapat dikecualikan.

1) Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidakperlu dibayar kembali.Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebutyaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan atau pada saatpendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah atau diterima olehBendahara Penerimaan SKPD atau diterima entitas lain diluar pemerintahdaerah atas nama BUD.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenispendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lainpendapatan yang sah.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yangbersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembalioleh pemerintah.Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekeningkas umum daerah, atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD, atauditerima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.Pendapatan LRA disajikan pada LaporanRealisasi Anggaran (LRA)diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer danLain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima



dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah. Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya.

b. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil. Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran. Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi. Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban. Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga diakui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang diakui pada akhir periode akuntansi. Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud diakui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item)



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 27.800.000,00 dan Rp 25.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00
Jumlah	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Asli Daerah	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 27.800.000,00 dan Rp 25.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Retribusi Daerah	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00
Jumlah	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga tidak mengelola Pendapatan Pajak Daerah

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 27.800.000,00 dan Rp 25.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00
Jumlah	Rp 23.400.000,00	Rp 27.800.000,00	Rp 25.640.000,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.1.2 Belanja

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja	Rp 7.773.521.575,00	Rp 7.677.694.430,00	Rp 6.345.667.869,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.677.694.430,00 dan Rp 6.345.667.869,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2021.

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Operasi	7.466.839.575,00	7.371.423.220,00	6.084.115.269,00
Belanja Modal	306.682.000,00	306.271.210,00	261.552.600,00
Jumlah	7.773.521.575,00	7.677.694.430,00	6.345.667.869,00

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Operasi	Rp 7.466.839.575,00	Rp 7.371.423.220,00	Rp 6.084.115.269,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 7.371.423.220,00 dan Rp 6.084.115.269,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Pegawai	2.836.743.373,00	2.765.951.672,00	2.507.354.853,00
Belanja Barang dan Jasa	3.491.354.202,00	3.466.729.548,00	2.942.258.039,00
Belanja Hibah	1.138.742.000,00	1.138.742.000,00	634.502.377,00
Jumlah	7.466.839.575,00	7.371.423.220,00	6.084.115.269,00

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Pegawai	2.836.743.373,00	2.765.951.672,00	2.507.354.853,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 2.765.951.672,00 dan Rp 2.507.354.853,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Gaji Pokok PNS	1.136.499.590,00	1.117.139.320,00	1.078.038.640,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128.340.548,00	117.333.135,00	124.331.890,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	149.931.740,00	142.585.000,00	137.842.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.965.244,00	25.975.000,00	26.713.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	81.655.364,00	74.013.240,00	76.547.940,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	76.656.270,00	75.396.417,00	43.257.909,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.617,00	13.010,00	14.985,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.228.110.000,00	1.206.926.550,00	1.014.465.489,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.170.000,00	1.170.000,00	743.000,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
Jumlah	2.836.743.373,00	2.765.951.672,00	2.507.354.853,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.491.354.202,00	Rp 3.466.729.548,00	Rp 2.942.258.039,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 23.466.729.548,00 dan Rp 2.942.258.039,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Per Akun :

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.065.000,00	3.065.000,00	4.676.500,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	10.035.060,00	10.025.684,00	6.231.316,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.901.000,00	33.894.750,00	27.262.000,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.050.293,00	12.033.125,00	53.380.943,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	400.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	46.237.819,00	46.200.000,00	48.678.741,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.401.709,00	46.347.000,00	40.816.637,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	6.100.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	26.372.651,00	26.364.500,00	9.380.340,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	45.437.250,00	45.417.000,00	23.909.500,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.353.483,00	7.350.000,00	10.270.884,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	5.013.806,00	4.988.000,00	13.280.317,00
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	10.406.221,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	202.742.637,00	202.720.080,00	36.148.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.613.000,00	18.613.000,00	25.908.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.217.000,00	38.217.000,00	223.174.800,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	20.675.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	168.510.000,00	168.364.869,00	141.488.410,00
Belanja Pakaian Paskibraka	168.467.000,00	168.282.882,00	163.101.411,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	397.160.000,00	397.160.000,00	473.340.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.490.000,00	24.990.000,00	47.250.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	339.252.000,00	324.029.390,00	227.086.866,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	93.063.460,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	227.568.000,00	222.255.437,00	192.344.532,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	66.528.000,00	66.202.228,00	84.303.303,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Belanja Jasa Tenaga Supir	20.688.000,00	20.609.558,00	20.578.256,00
Belanja Jasa Tata Rias	20.250.000,00	20.250.000,00	10.800.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00
Belanja Tagihan Air	1.316.000,00	460.600,00	570.400,00
Belanja Tagihan Listrik	81.418.500,00	81.367.786,00	66.114.074,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.170.000,00	22.170.000,00	26.850.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.000.000,00	8.774.740,00	9.221.233,00
Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.600.000,00	7.296.600,00	3.328.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	47.703.486,00	47.669.011,00	44.448.130,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.571.908,00	3.571.908,00	2.890.792,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17.700.000,00	17.500.000,00	4.200.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Belanja Sewa Mebel	3.300.000,00	3.300.000,00	187.000,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.500.000,00	3.500.000,00	4.500.000,00
Belanja Sewa Hotel	13.000.000,00	13.000.000,00	5.272.000,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	0,00	49.500.000,00
Belanja Sosialisasi	319.860.100,00	319.780.000,00	298.740.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	61.964.000,00	61.963.200,00	30.975.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	488.450,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.140.000,00	4.130.000,00	3.660.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.120.000,00	3.120.000,00	7.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	2.760.000,00	4.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	63.550.000,00	63.486.000,00	38.720.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	502.148.000,00	501.446.200,00	224.125.723,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.914.000,00	64.794.000,00	35.681.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	10.200.000,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.984.500,00	1.980.000,00	0,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	277.250.000,00	277.250.000,00	40.350.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah	3.491.354.202,00	3.466.729.548,00	2.942.258.039,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Hibah	Rp 1.138.742.000,00	Rp 1.138.742.000,00	Rp 634.502.377,00

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 1.138.742.000,00 dan Rp 634.502.377,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 Per Akun

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.093.742.000,00	1.093.742.000,00	634.502.377,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Jumlah	1.138.742.000,00	1.138.742.000,00	634.502.377,00

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan olahraga tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial Selain Belanja Hibah

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal	Rp 306.682.000,00	Rp 306.271.210,00	Rp 261.552.600,00

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Pemuda dan Olahraga meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	228.898.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.532.000,00	26.430.000,00	32.654.600,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.500.000,00	274.191.210,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
Jumlah	306.682.000,00	306.271.210,00	261.552.600,00

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 228.898.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 228.898.000,00



Rincian Belanja Modal Tanah TA. 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	0,00	0,00	39.478.000,00
Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	189.420.000,00
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olahraga	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	228.898.000,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.532.000,00	26.430.000,00	32.654.600,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 26.430.000,00 dan Rp 32.654.600,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	5.969.600,00
Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	15.985.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	19.000.000,00	18.900.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	7.400.000,00
Belanja Modal Mebel	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Personal Computer	4.032.000,00	4.030.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya			3.300.000,00
Jumlah	26.532.000,00	26.430.000,00	32.654.600,00

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.500.000,00	274.191.210,00	0,00

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 274.191.210,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 sebagai berikut:



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	250.000.000,00	249.691.210,00	0,00
Belanja Modal Taman	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
Jumlah	274.500.000,00	274.191.210,00	0,00

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Perlengkapan Pasang Rawa	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

	Anggaran	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 5.650.000,00 dan Rp 0,00

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00
Jumlah	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Terdapat Belanja Tak Terduga

5.1.3 Transfer

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Terdapat Tranfer Bagi Hasil Pendapatan atau pun Tranfer Bantuan Keuangan.



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.1.4 Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Tidak Terdapat Penerimaan Pembiayaan ataupun Pengeluaran Pembiayaan

5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Anggaran (7.750.121.575,00)	Realisasi 2022 (7.649.894.430,00)	Realisasi 2021 (6.320.027.869,00)
---	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp 11.155.852.690,97 Kewajiban sebesar Rp 100.940.921,00 dan Ekuitas sebesar Rp 11.054.911.769,97

5.2.1 Aset

Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp 11.155.852.690,97	Rp 11.465.843.672,97

Total saldo Aset Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.155.852.690,97 Mengalami Penurunan sebesar Rp 307.315.952,00 dari tahun 2021 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742,00
Aset Tetap	11.153.483.115,97	11.464.518.839,97	2,71	(311.035.724,00)
Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	11.155.852.690,97	11.465.843.672,97	2,70	(309.990.982,00)

5.2.1.1 Aset Lancar

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lancar	Rp. 2.369.575,00	Rp. 1.324.833,00

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Pemuda dan Olahragaper tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.369.575,00 atau naik sebesar Rp 1.044.742,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp 1.324.833,00 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742,00
Jumlah	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742,00



5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Dibayar Dimuka	2.369.575,00	1.324.833,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp 2.369.575,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.324.833,00

Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Dibayar Di Muka	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742
Jumlah	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742

Adapun rincian sebagai berikut :

Beban Pajak Dibayar Di Muka				
Uraian	Saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Pajak Kendaraan Bormotor Beroda Dua	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742
Jumlah	2.369.575,00	1.324.833,00	78,86	1.044.742

5.2.1.1.2 Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	0,00	0,00

Saldo persediaan sebesar Rp0,00 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2022 dan saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00

Dinas Pemuda dan Olahraga
Tabel, Laporan Persediaan Per 31 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		0,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,00
4	Ditambah:		
5	Belanja persediaan LRA 2021	1.122.112.890,00	
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
8	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	1.122.112.890,00	
9	Dikurangi:		
10	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020	0,00	
11	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	
12	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	0,00	
13	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+8+13)		1.122.112.890,00
14	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)		(1.122.112.890,00)
15	Persediaan tahun 2021 (14+15)		0,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap	11.153.483.115,97	11.464.518.839,97

Saldo Aset Tetap Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11.153.483.115,97 mengalami Penurunan sebesar Rp 311.035.724,00 dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	6.712.239.730,00	6.868.239.730,00	(2,27)	(156.000.000,00)
Peralatan dan Mesin	2.319.190.081,00	2.287.110.081,00	1,40	32.080.000,00
Gedung dan Bangunan	6.923.253.769,97	6.673.562.559,97	3,74	249.691.210,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.611.560,00	126.111.560,00	19,43	24.500.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00		0,00
Akumulasi Penyusutan	(4.951.812.025,00)	(4.490.505.091,00)	10,27	(461.306.934,00)
Jumlah	11.153.483.115,97	11.464.518.839,97	(2,71)	(311.035.724,00)

Saldo Awal 1 Januari 2022		11.464.518.839,97
Penambahan :		
Belanja Modal 2022	306.271.210,00	
Koreksi Pencatatan aset tetap	0,00	
Mutasi masuk dari SOPD	0,00	
Reklas dari belanja barang dan jasa	0,00	
Pembelian dari Dana BOS/BLUD	0,00	
Penambahan bukan pengadaan (Hibah)	0,00	
Reklas aset tetap di skpd	0,00	
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	
Jumlah Penambahan		306.271.210,00
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	0,00	
• Reklas keluar ke ekstrakom	0,00	
• Beban penyusutan	461.306.934,00	
• Mutasi keluar ke SOPD lain	156.000.000,00	
• Reklas aset tetap dan aset lainnya	0,00	
• Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	
• Reklas keluar ke persediaan	0,00	
Jumlah Pengurangan		617.306.934,00
Jumlah (1+2-3)		11.153.483.115,97

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:



5.2.1.2.1 Tanah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tanah	6.712.239.730,00	6.868.239.730,00

Saldo Aset Tanah Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.712.239.730,00 mengalami pengurangan dibandingkan saldo tahun sebelumnya yang di sebabkan adanya Mutasi Aset Tanah Lapangan Sepak Bola Ke Kelurahan Kudangan sebagaimana terrincin dibawah ini

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	6.868.239.730,00	156.000.000,00	0,00	6.712.239.730,00	(156.000.000,00)
Jumlah	6.868.239.730,00	156.000.000,00	0,00	6.712.239.730,00	(156.000.000,00)

Tanah **6.868.239.730,00**

Penambahan :

- Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja ModalTanah) 0,00
- Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00
- Mutasi Masuk antar OPD 0,00

Jumlah Penambahan 0,00

Pengurangan :

- (0,00)
- Mutasi Keluar antar OPD (Ke Kelurahan Kudangan) (156.000.000,00)
- Penghapusan

Jumlah Pengurangan (156.000.000,00)

Jumlah (1+2-3) 6.712.239.730,00

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	2.319.190.081,00	2.287.110.081,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 2.319.190.081,00 mengalami Penambahan sebesar Rp 32.080.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2021	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	2.287.110.081,00	0,00	32.080.000,00	2.319.190.081,00	32.080.000,00
Jumlah	2.287.110.081,00	0,00	32.080.000,00	2.319.190.081,00	32.080.000,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Penambahan sebesar Rp 32.080.000,00 pengurangan sebesar (Rp 0,00) dengan rincian sebagai berikut :

2.287.110.081,00

Penambahan :

- Belanja Modal Tahun 2022 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin) 26.430.000,00
- Belanja modal dari dana bos /blud 0,00
- Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi 0,00
- Reklas masuk dari Belanja Barang & Jasa 0,00
- Reklas masuk dari Aset Tetap lainnya 5.650.000,00
- Hibah dari Kementrian
- Mutasi Masuk OPD

Koreksi pencatatan 0,00
0,00

Jumlah Penambahan 32.080.000,00

Pengurangan :

- Mutasi keluar dari SOPD (0,00)
- Reklas ke Barang Jasa (0,00)
- Reklas ke Gedung dan Bangunan (0,00)
- Reklas ke Aset lainnya (rusak berat) (0,00)
- Reklas keluar ke ekstrakompentable (0,00)
- Reklas keluar ke persediaan (barang yang akan diserahkan ke masyarakat yaitu mobil) (0,00)

Jumlah Pengurangan (0,00)

Jumlah (1+2-3) 2.319.190.081,00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Gedung dan Bangunan 6.923.253.769,97 6.673.562.559,97

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 6.923.253.769,97 mengalami kenaikan sebesar Rp 249.691.210,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	6.673.562.559,97	24.500.000,00	274.191.210,00	6.923.253.769,97	249.691.210,00
Jumlah	6.673.562.559,97	24.500.000,00	274.191.210,00	6.923.253.769,97	249.691.210,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Penambahan sebesar Rp 274.191.210,00 dan pengurangan sebesar Rp 24.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	6.673.562.559,97
Penambahan :	
• Belanja Modal Tahun 2022(Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	274.191.210,00
• Reklas dari Belanja Barang Jasa	0,00
• Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00
• Reklas masuk dari Peralatan dan Mesin	0,00
• Reklas masuk dari KDP	0,00
• Hibah dari kementrian	0,00
• Mutasi masuk antar SOPD	0,00
Koreksi Saldo Awal (atas temuan BPK)	
Jumlah Penambahan	274.191.210,00
Pengurangan :	
• Reklasifikasi keluar ke Barang Jasa	(0,00)
• Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	(24.500.000,00)
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)
• Reklas keluar ke KDP	(0,00)
• Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud	(0,00)
• Mutasi keluar antar SOPD	(0,00)
• Penghapusan	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(24.500.000,00)
Jumlah (1+2-3)	6.923.253.769,97

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan	150.611.560,00	126.111.560,00

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 150.611.560,00 mengalami Penambahan sebesar Rp 24,500.000,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.111.560,00	0,00	24.500.000,00	150.611.560,00	24.500.000,00
Jumlah	126.111.560,00	0,00	0,00	150.611.560,00	24.500.000,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Penambahan sebesar Rp 0,00 dan pengurangan sebesar (Rp0,00) dengan rincian sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan	126.111.560,00
Penambahan :	
• Koreksi pencatatan saldo awal	
• Belanja Modal Tahun 2021(Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja ModalJalan, Irigasi dan Jaringan)	0,00
• Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	24,500.000,00
• Reklasifikasi Masuk dari KDP	0,00
• Hibah jaringan listrik dari desa sukamaju dan desa sumber cahaya	0,00
• Mutasi Masuk dari OPD	0,00
Jumlah Penambahan	24,500.000,00
Pengurangan :	
• Reklas keluar ke Tanah	(0,00)
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(0,00)
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	(0,00)
• Reklas keluar ke KDP	(0,00)
• Reklas keluar ke barang jasa	(0,00)
• Reklas keluar ke Investasi Permanen	(0,00)
• Mutasi Keluar dari OPD	(0,00)
• Penghapusan	(0,00)
Jumlah Pengurangan	(0,00)
Jumlah (1+2-3)	150.611.560,00

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Pemuda dan Olahraga per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 sama dengan tahun lalu

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Penambahan sebesar Rp 5.650.000,00 dan pengurangan sebesar Rp 5.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya	0,00
Penambahan :	
• Koreksi pencatatan saldo awal	0,00
• Belanja Modal Tahun 2021 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja ModalJalan, Irigasi dan Jaringan)	5.650.000,00
• Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

• Reklasifikasi Masuk dari KDP	0,00	
• Hibah jaringan listrik dari desa sukamaju dan desa sumber cahaya	0,00	
• Mutasi Masuk dari OPD	0,00	
Jumlah Penambahan		5.650.000,00
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke Tanah	(0,00)	
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	(5.650.000,00)	
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	(0,00)	
• Reklas keluar ke KDP	(0,00)	
• Reklas keluar ke barang jasa	(0,00)	
• Reklas keluar ke Investasi Permanen	(0,00)	
• Mutasi Keluar dari OPD	(0,00)	
• Penghapusan	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2-3)		0,00

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan	(4.951,812,025,00)	(4.490.505.091,00)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Pemuda dan Olahraga per 31Desember 2022 adalah sebesar (Rp 4.951,812,025,00) mengalami peningkatan sebesar (Rp 461.306.934,00) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2021	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2022	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	(4.490.505.091,00)	(0)	(461.306.934,00)	(4.951,812,025,00)	461.306.934,00
Jumlah	(4.490.505.091,00)	(0)	(461.306.934,00)	(4.951,812,025,00)	461.306.934,00

Penambahan sebesar (Rp 461.306.934,00) sebesar dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	(4.490.505.091,00)
Penambahan :	
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(113.366.972,00)
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(336.101.441,00)
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(11.838.521,00)
Jumlah Penambahan	(461.306.934,00)
Pengurangan :	
• Penghapusan	
• Mutasi	
• Koreksi Salah Saji	
Jumlah Pengurangan	
Jumlah (1+2-3)	(4.951,812,025,00)



5.2.2 Aset Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya	0,00	0,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp 0,00, terdiri atas akumulasi Aset yang dibatasi penggunaannya, Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya sebelum sebesar Rp 0,00 terdapat kenaikan sebesar Rp 0,00 yang secararingkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.1 Aset Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	Rp 8.250.000,00	Rp 8.250.000,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnya masuk kedalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat dan obat expired. Saldo per 31 desember 2022 sebesar Rp 8.250.000,00 Tidak mengalami kenaikan/Penurunan Atau Tetap sebesar Rp 8.250.000,00

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2021
Aset Rusak Berat/Usang Kendaraan Dinas Roda Dua	8.250.000,00	8.250.000,00
Jumlah	8.250.000,00	8.250.000,00

5.2.2.1.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp 8.250.000,00) dan 31 Desember 2021 sebesar (Rp 8.250.000,00).

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	0,00	(0,00)
Jumlah	(8.250.000,00)	(8.250.000,00)	0,00	(0,00)



DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

5.2.3 Kewajiban

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban	100.940.921,00	86.630.670,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp 100.940.921,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.310.251,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	100.940.921,00	86.630.670,00	16,52	14.310.251,00
Jumlah	100.940.921,00	86.630.670,00	16,52	14.310.251,00

5.2.3.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek	100.940.921,00	86.630.670,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp 100.940.921,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.310.251,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang Beban	100.940.921,00	86.630.670,00	16,52	14.310.251,00
Jumlah	100.940.921,00	86.630.670,00	16,52	14.310.251,00

5.2.3.2 Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	100.940.921,00	86.630.670,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2022 sebesar Rp 100.940.921,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 14.310.251,00 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	100.940.921,00	86.630.670,00	16,52	14.310.251,00
Jumlah	100.940.921,00	86.630.670,00	16,52	14.310.251,00

Rincian Utang Beban Pegawai sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub. Desember 2021	95.083.603,00	86.605.070,00
Jumlah	95.083.603,00	86.605.070,00

Rincian Utang Beban Barang Jasa sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2022	31 Des 2021
Hutang Tagihan Rekening Air PDAM Ub. Desember 2022	78.500,00	25.600,00
Hutang Tagihan Listrik Ub. Desember 2022	5.045.938,00	0,00
Hutang Tagihan Internet/Telepon Ub. Desember 2022	732.880,00	0,00
Hutang Pajak	0,00	0,00
dll	0,00	0,00
Jumlah	5.857.318,00	25.600,00



5.2.3.3 Ekuitas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Ekuitas	11.054.911.769,97	11.379.213.002,97
Saldo ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp 11.054.911.769,97 mengalami Penurunan sebesar Rp 324.301.233,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.		

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	11.054.911.769,97	11.379.213.002,97	2,85	324.301.233,00
Jumlah	11.054.911.769,97	11.379.213.002,97	2,85	324.301.233,00

5.2.3.4 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban dan Ekuitas	11.155.852.690,97	11.465.843.672,97
Saldo kewajiban dan ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.155.852.690,97 mengalami penurunan sebesar Rp 309.990.982,00 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.		

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	11.155.852.690,97	11.465.843.672,97	2,70	309.990.982,00
Jumlah	11.155.852.690,97	11.465.843.672,97	2,70	309.990.982,00

5.3 Kegiatan Operasional

5.3.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus/Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;



- 3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Lamandau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	27.800.000,00	25.640.000,00	2.160.000,00	8,42
Pendapatan Retribusi Daerah	27.800.000,00	25.640.000,00	2.160.000,00	8,42
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2022. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 27.800.000,00 tahun 2021 sebesar Rp 25.640.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	27.800.000,00	25.640.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Jumlah	27.800.000,00	25.640.000,00

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Pemuda dan Olahraga Titak Mengelola Pendapatan Pajak Daerah

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 27.800.000,00 dan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 25.640.000,00

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dinas Pemuda dan Olahraga Titak Mengelola Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dinas Pemuda dan Olahraga Titak Mengelola Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2022 sebesar Rp 7.845.995.663,00 tahun 2021 sebesar Rp 6.566.086.297,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	2.774.430.205,00	2.523.790.870,00
Beban Persediaan	1.122.112.890,00	905.639.020,00
Beban Jasa	1.643.324.234,00	1.678.082.688,00
Beban Pemeliharaan	139.839.200,00	90.223.450,00
Beban Perjalanan Dinas	566.240.200,00	270.006.723,00
Beban Hibah	1.138.742.000,00	634.502.377,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.366.972,00	118.551.728,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	336.101.441,00	333.525.836,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.838.521,00	11.763.605,00
Jumlah	7.845.995.663,00	6.566.086.297,00

5.3.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2022. Beban Operasi pada tahun 2022 sebesar Rp 7.845.995.663,00 dan tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 6.566.086.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2022	2021
Beban Pegawai	2.774.430.205,00	2.523.790.870,00
Beban Persediaan	1.122.112.890,00	905.639.020,00
Beban jasa	1.643.324.234,00	1.678.082.688,00
Beban Pemeliharaan	139.839.200,00	90.223.450,00
Beban Perjalanan Dinas	566.240.200,00	270.006.723,00
Beban Hibah	1.138.742.000,00	634.502.377,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.366.972,00	118.551.728,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	336.101.441,00	333.525.836,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.838.521,00	11.763.605,00
Jumlah	7.845.995.663,00	6.566.086.297,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 2.774.430.205,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 250.639.335,00 atau 9,93% bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2021 sebesar Rp 2.523.790.870,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2022 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2022.

Rincian Beban Pegawai tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.117.139.320,00	1.078.038.640,00	39.100.680,00	3,63
Beban Tunjangan Keluarga PNS	117.333.135,00	124.331.890,00	(6.998.755,00)	(5,63)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	142.585.000,00	137.842.000,00	4.743.000,00	3,44
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.975.000,00	26.713.000,00	(738.000,00)	(2,76)
Beban Tunjangan Beras PNS	74.013.240,00	76.547.940,00	(2.534.700,00)	(3,31)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	75.396.417,00	43.257.909,00	32.138.508,00	74,30
Beban Pembulatan Gaji PNS	13.010,00	14.985,00	(1.975,00)	(13,18)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.215.405.083,00	1.030.901.506,00	184.503.577,00	17,90
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.170.000,00	743.000,00	427.000,00	57,47
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00
Jumlah	2.774.430.205,00	2.523.790.870,00	250.639.335,00	9,93

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 1.122.112.890,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 216.473.870,00 atau 23,90 % bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2021 sebesar Rp. 905.639.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.065.000,00	4.676.500,00	(1.611.500,00)	(34,46)
Beban Bahan-Bahan Kimia	10.025.684,00	6.231.316,00	3.794.368,00	60,89
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.894.750,00	27.262.000,00	6.632.750,00	24,33
Beban Bahan-Bahan Lainnya	12.033.125,00	53.380.943,00	(41.347.818,00)	(77,46)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan	46.200.000,00	48.678.741,00	(2.478.741,00)	(5,09)



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Kantor-Alat Tulis Kantor				
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.347.000,00	40.816.637,00	5.530.363,00	13,55
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000,00	6.100.000,00	(100.000,00)	(1,64)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.364.500,00	9.380.340,00	16.984.160,00	181,06
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	45.417.000,00	23.909.500,00	21.507.500,00	89,95
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.350.000,00	10.270.884,00	(2.920.884,00)	(28,44)
Beban Obat-Obatan-Obat	4.988.000,00	13.280.317,00	(8.292.317,00)	(62,44)
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	10.406.221,00	(10.406.221,00)	(100,00)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	202.720.080,00	36.148.000,00	166.572.080,00	460,81
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.613.000,00	25.908.000,00	(7.295.000,00)	(28,16)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.217.000,00	223.174.800,00	(184.957.800,00)	(82,88)
Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	20.675.000,00	(20.675.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100
Beban Pakaian Olahraga	168.364.869,00	141.488.410,00	26.876.459,00	19,00
Beban Pakaian Paskibraka	168.282.882,00	163.101.411,00	5.181.471,00	3,18
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	100
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	277.250.000,00	40.350.000,00	236.900.000,00	587,11
Jumlah	1.122.112.890,00	905.639.020	216.473.870,00	23,90

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainnya, periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 1.643.324.234,00 mengalami Penurunan sebesar (Rp 34.758.454,00) atau 2,07% bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2021 sebesar Rp 1.678.082.688,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo2022	Saldo 2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	397.160.000,00	473.340.000,00	(76.180.000,00)	(16,09)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.990.000,00	47.250.000,00	(22.260.000,00)	(47,11)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	324.029.390,00	227.086.866,00	96.942.524,00	42,69
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	93.063.460,00	(93.063.460,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	222.255.437,00	192.344.532,00	29.910.905,00	15,55
Beban Jasa Tenaga Keamanan	66.202.228,00	84.303.303,00	(18.101.075,00)	(21,47)
Beban Jasa Tenaga Supir	20.609.558,00	20.578.256,00	31.302,00	0,15
Beban Jasa Tata Rias	20.250.000,00	10.800.000,00	9.450.000,00	87,50
Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00	0,00
Beban Tagihan Air	513.500,00	528.700,00	(15.200,00)	(2,87)
Beban Tagihan Listrik	86.413.724,00	66.114.074,00	20.299.650,00	30,70
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.170.000,00	26.850.000,00	(4.680.000,00)	(17,43)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.507.620,00	9.221.233,00	286.387,00	3,11
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.251.858,00	5.064.342,00	1.187.516,00	23,45



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	47.669.011,00	44.448.130,00	3.220.881,00	7,25
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.571.908,00	2.890.792,00	681.116,00	23,56
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	17.500.000,00	4.200.000,00	13.300.000,00	316,67
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
Beban Sewa Mebel	3.300.000,00	187.000,00	3.113.000,00	1.664,71
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.500.000,00	6.000.000,00	(500.000,00)	(8,33)
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	40,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.500.000,00	4.500.000,00	(1.000.000,00)	(22,22)
Beban Sewa Hotel	13.000.000,00	5.272.000,00	7.728.000,00	146,59
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	0,00	49.500.000,00	(49.500.000,00)	(100,00)
Beban Sosialisasi	319.780.000,00	298.740.000,00	21.040.000,00	7,04
Jumlah	1.643.324.234,00	1.678.082.688,00	(34.758.454,00)	(2,07)

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 139.839.200,00 dan Kenaikan sebesar Rp 49.615.750,00 atau 54,99% bila dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2021 sebesar Rp 90.223.450,00

Rincian Beban Pemeliharaan p tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut:

Uraian	Saldo2022	Saldo2021	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	61.963.200,00	30.975.000,00	30.988.200,00	100,04
Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	488.450,00	(488.450,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.130.000,00	3.660.000,00	470.000,00	12,84
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.120.000,00	7.200.000,00	(4.080.000,00)	(56,67)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	-	-
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.760.000,00	4.800.000,00	(2.040.000,00)	(42,50)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	63.486.000,00	38.720.000,00	24.766.000,00	63,96
Jumlah	139.839.200,00	90.223.450,00	49.615.750,00	54,99

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp 566.240.200,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp 296.233.477,00 atau 109,71 % bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

tahun 2021 sebesar Rp 270.006.723,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	501.446.200,00	224.125.723,00	277.320.477,00	123,73
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	64.794.000,00	35.681.000,00	29.113.000,00	81,59
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	10.200.000,00	(10.200.000,00)	(100,00)
Jumlah	566.240.200,00	270.006.723,00	296.233.477,00	109,71

5.3.2.1.6 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp 1.138.742.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 504.239.623,00 atau 79,47 % bila dibandingkan dengan beban hibah tahun 2021 sebesar Rp 634.502.377,00 Beban Hibah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau adalah Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat dan Uang diberikan kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2022	Saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.093.742.000,00	634.502.377,00	459.239.623,00	72,38
Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
Uang untuk diberikan kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Uang Untuk diberikan kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.138.742.000,00	634.502.377,00	504.239.623,00	79,47

5.3.2.1.7 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, aset tetap tahun 2022 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2022 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2022 sebesar Rp 461.306.934,00 dan mengalami Penurunan sebesar (Rp 2.534.235,00) atau 0,55% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2021 sebesar Rp 463.841.169,00 Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

Beban Penyusutan sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2022	saldo 31 Des 2021	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	113.366.972,00	118.551.728,00	(5.184.756,00)	(4,37)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	336.101.441,00	333.525.836,00	2.575.605,00	0,77
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.838.521,00	11.763.605,00	74.916,00	0,64
Jumlah	461.306.934,00	463.841.169,00	(2.534.235,00)	(0,55)



5.3.2.1.8 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	27.800.000,00	25.640.000,00	(2.160.000,00)	8,42
Beban	(7.845.995.663,00)	(6.566.086.297,00)	(1.279.909.366,00)	19,49
Surplus/Defisit LO	(7.818.195.663,00)	(6.540.446.297,00)	(1.277.749.366,00)	19,54

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
EKUITAS AWAL	11.379.213.002,97	11.592.587.779,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.818.195.663,00)	(6.540.446.297,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendaharan Dana Bos	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	0,00	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Utang PFK	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	9.841.153,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	0,00)	(2.797.502,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	7.493.894.430,00	6.320.027.869,00
EKUITAS AKHIR	11.054.911.769,97	11.379.213.002,97

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2021 senilai Rp 11.379.213.002,97;
2. Surplus/Defisit – LO senilai (Rp 7.818.195.663,00) merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2022;
3. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar Rp 7.493.894.430,00
4. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp 11.054.911.769,97 sama dengan ekuitas akhir di Neraca per 31 Desember 2022



BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta yuridiksi entitas berada Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau. Domisili Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau di Jalan Bukit Hibul Barat No.169 Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya. Sifat operasi entitas terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kegiatan pokoknya meliputi Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Modal.
- c. Komitmen atau kontijensi yang tidak dapat disajikan pada neraca. Komitmen yang tidak ada dalam Neraca adalah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung.



DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMANDAU

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten sebagai entitas akuntansi merupakan bagian dari Laporan Keuangan entitas pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan anAudited Tahun 2022 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban sebagai suatu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan Laporan Realisasi APBD dan Neraca.

Kami berharap dengan Laporan Keunagan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau tahun 2022 berbasis Akrua, Pengungkapan yang disajikan dalam Laopran ini, dapat berguna bagi Pemerintah Daerah. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas SOPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau di masa yang akan datang.

Nanga Bulik, 23 Juni 2023

Pengguna Anggaran,

LUHUT TAMPUBOLON, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640827 199003 1 001